

**Wawancara INFOMEDIA dengan saya pada November 2014  
tentang Outlook Pendidikan Tinggi 2014/2015**

**1. Bagaimana pendapat Bapak tentang pemisahan Kemdikbud menjadi dua: Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Ristek dan Dikti? Apakah positif – negatifnya (khususnya bagi dunia Pendidikan Tinggi)?**

Wacana pemisahan Dikti dari Kemdikbud dan penggabungannya dengan Kemristek telah mengemuka sejak bulan Februari 2014. Pro kontra pun terjadi. Daoed Joesoef termasuk yang menentang ide tersebut. Dalam beberapa tulisan saya yang dimuat di Kompas, antara lain “Kinerja Riset perguruan Tinggi Kita” (Kompas, 8 Maret 2014) dan “Membangun Perekonomian Berbasis Iptek” (Kompas, 3 September 2014), saya juga tidak melihat langkah tersebut sebagai solusi atas permasalahan yang ada, yaitu rendahnya kinerja riset di perguruan tinggi kita ataupun tidak teraplikasikannya hasil riset di dunia industri. Akar dari kedua masalah ini bukan karena Dikti “salah tempat”, tapi ada alasan lainnya yang lebih fundamental, yaitu kapasitas dosen dalam melakukan riset di satu sisi dan tidak adanya industri di Indonesia yang berinvestasi di kegiatan riset (yang pada umumnya memakan waktu lama, dengan derajat ketidakpastian yang cukup tinggi pula) di sisi lain.

Sekarang Dikti telah bergabung dengan Ristek. Yang saya lihat saat ini lebih banyak sisi negatifnya, misalnya akan terjadinya pergeseran arah riset di PT ke arah riset aplikatif, padahal riset dasar tetap diperlukan. Selain itu, riak-riak kecil dan besar akan muncul di perguruan tinggi yang selama ini tidak melakukan riset, dan mereka ini banyak jumlahnya (tiga ribuan). Bila mereka juga dipaksa melakukan riset, padahal *core business* mereka selama ini adalah pengajaran, saya sulit membayangkan apa yang akan terjadi. Padahal, riset juga membutuhkan dana. Dari mana sumber dananya? Apakah penyatuan Ristek dan Dikti disertai dengan peningkatan dana yang signifikan? Bila tidak, maka ini hanya peristiwa pindah rumah, tidak diikuti dengan perubahan apa-apa kecuali kerepotan peristiwa pindahan itu.

**2. Apakah PR besar yang harus lebih dahulu ditangani oleh Kementerian Ristek dan Dikti menyangkut pendidikan tinggi kita?**

Secara implisit, saya sudah menjawab pertanyaan ini di atas. PR besar bagi Kemristek-dikti adalah bagaimana “mengurus” perguruan tinggi yang selama ini tidak mempunyai kapasitas untuk riset, yang jumlahnya melampaui 3000

perguruan tinggi. Apa maknanya 3000 PT tersebut satu atap dengan Ristek? Kemristek-dikti harus menjawab pertanyaan ini (dengan program-program yang akan digulirkannya).

3. **Apa masalah utama Pendidikan Tinggi (PT) selama 2014 ini? Tahun 2013 lalu, Pak Hendra mengatakan: “Masalah terbesar kita adalah rendahnya mutu perguruan tinggi kita, dengan permasalahan pokok antara lain terkait dengan status hukum sejumlah PTN, sistem pengelolaan keuangan PTN, dan sistem kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan.”**

**Menurut pengamatan Bapak, bagaimana perkembangannya di 2014?**

Status hukum sejumlah PTN yang saya maksudkan tahun lalu sekarang sudah “settled” sebagai PTN-BH, walau sistem pengelolaan keuangan masih mengalami masalah. Walau “otonom”, para PTN-BH masih harus mengikuti sejumlah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (cq Kemenkeu). Secara umum, “otonomi” perguruan tinggi di Indonesia tidak ada. Banyak hal masih diatur dengan cukup ketat oleh Pemerintah, sebutlah misalnya urusan pengangkatan Guru Besar. Baik di PTN-BH maupun di PTS, usulan pengangkatan Guru Besar harus mendapat persetujuan dari Dikti. Kecuali beberapa PTN-BH, perguruan tinggi tidak dapat membuka program studi tanpa persetujuan Dikti. Bahkan sekarang ada Peraturan Menteri yang mengatur berbagai standar pendidikan tinggi, antara lain jumlah SKS dan syarat kelulusan pada tiap jenjang pendidikan tinggi, yang cenderung menyeragamkan.

4. **Menurut Bapak, secara umum, bagaimana kondisi tenaga pendidik PTN/PTS di Indonesia bila dilihat dari:**

- **Faktor kuantitas/jumlah tenaga pendidik dan sebarannya di Indonesia**
- **Kualitas**
- **Kesejahteraan**

Saat ini terdapat sekitar 300.000 dosen, separuh di antaranya bergelar magister (memenuhi persyaratan kualifikasi akademik untuk menjadi dosen). Sebanyak 125.000 dosen masih bergelar sarjana (atau lebih rendah), dan sekitar 25.000 dosen telah bergelar doktor. Saya tidak tahu persis bagaimana sebarannya di Indonesia, tetapi dari 25.000 dosen yang telah bergelar doktor tersebut, 19.500 orang di antaranya adalah dosen PTN. Padahal, jumlah PTN hanya sekitar 125 PT dari hampir 4000 PT yang ada di Indonesia. Jadi kualitas dosen di PTS dalam hal ini sangat mengkhawatirkan.

Saya tidak mempunyai data tentang kesejahteraan, namun pada kesempatan ini saya ingin mengatakan: adalah wajar bagi dosen yang berkualifikasi doktor dan berkualitas baik untuk mendapat kesejahteraan yang baik; demikian juga bila dosen yang masih berkualifikasi sarjana dan berkualitas rendah tidak mendapat

kesejahteraan yang memadai. Namun, saya tidak menutup mata bahwa banyak dosen bergelar doktor dan berkualitas baik tidak mendapat imbalan yang memadai (antara lain karena kepegangannya yang rendah), sehingga mereka memilih bekerja di negara lain.

**5. Apa masalah utama tenaga pendidik PTN/PTS di Indonesia – khususnya pada 2014 ini?**

Secara tak langsung, saya telah menjawab pertanyaan ini di atas. Masih banyaknya dosen kita yang hanya bergelar sarjana, terutama di PTS, tentunya berkorelasi positif dengan kualitas perguruan tinggi yang pas-pasan. Secara nasional, jumlah orang yang bergelar magister atau doktor dan berminat untuk menjadi dosen memang rendah. Artinya, kapasitas untuk melakukan riset juga rendah. Padahal, kualitas perguruan tinggi ditentukan terutama oleh kualitas dosennya, bukan sekadar gedung atau kurikulumnya.

**6. Apa tantangan terbesar yang dihadapi para pendidik kita tahun 2014 ini dan tahun 2015/masa mendatang?**

Dengan semakin terbukanya informasi di dunia maya (via Internet), dosen sekarang dan ke depan akan bersaing dengan "Professor Google". Bila dosen tidak memperbaharui pengetahuannya setiap saat, dosen akan tergilas oleh zaman. Hanya dosen yang selalu memperbaharui pengetahuannya yang bisa bertahan, dan dosen yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan (baca: riset) yang akan menang, tidak sekadar bertahan.

**7. Bagaimana meningkatkan mutu tenaga pendidik PTN/PTS? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, universitas dan dosen sendiri?**

Yang paling mudah adalah merekrut yang sudah "matang". Tetapi apa yang dapat ditawarkan oleh PT kita? Andai dana berlimpah, PT kita bahkan dapat merekrut dosen terbaik di dunia. Namun dengan dana terbatas, masih ada orang yang mau mengajar pun patut disyukuri. Untuk mengubah keadaan ini, saya berharap Pemerintah memberikan contoh perguruan tinggi yang baik itu seperti apa, misalnya dengan menjadikan beberapa PTN sebagai PT percontohan. Untuk PTS, saya berharap ada filantropis yang mendirikan perguruan tinggi bukan untuk mencari untung, tetapi memajukan negeri melalui kegiatan riset dan pendidikan. Bila ini terjadi, maka orang akan tertarik menjadi dosen, dan pada gilirannya perguruan tinggi kita akan dipenuhi oleh dosen-dosen berkualitas.

**8. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan online learning/E-campus (program pembelajaran daring atau pembelajaran melalui website sebagai media belajar online tanpa terikat jadwal dan tempat) di perguruan-perguruan tinggi kita?**

Di satu sisi ini tentunya positif, perguruan tinggi dapat menjangkau masyarakat luas. Di sisi lain, kualitas tetap harus dijaga. Selain itu, sejumlah program studi tetap memerlukan tatap muka dan fasilitas fisik yang berkualitas --- sebutlah misalnya program studi kedokteran. Kegiatan tatap muka juga amat penting bagi program studi keguruan. Dalam hal ini, saya mengkhawatirkan kualitas sarjana kependidikan (baca: calon guru) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dengan metode pembelajaran jarak jauh, yang saat ini semakin dimungkinkan dengan dukungan Internet.

**9. Secara umum, bagaimana kerja sama pendidikan tinggi Indonesia dengan negara-negara lain? Apakah sudah efektif dan apa yang masih harus ditingkatkan?**

Saya tidak mempunyai data yang cukup untuk menjawab pertanyaan ini, namun dari pengamatan saya yang terbatas saya mempunyai kesan bahwa kerja sama pendidikan tinggi Indonesia dengan mitra dari negara lain hanya dilakukan sebatas untuk meningkatkan “nilai jual” perguruan tinggi kita, bukan kerja sama yang setara untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam benak saya, kerja sama yang ideal adalah kerja sama yang setara untuk pengembangan iptek yang sama-sama bermanfaat bagi kedua pihak.

**10. Saya sering mendengar orang tua murid yang mengeluh karena biaya kuliah PTN maupun PTS saat ini dirasakan sangat tinggi. Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana sebaiknya?**

Tentu sebagai orangtua saya pun akan senang apabila anak saya bisa kuliah di PT tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Tapi, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas perguruan tinggi itu sendiri. Maukah kuliah gratis di perguruan tinggi yang kualitasnya rendah? Nah, masalah menjadi serius bila kita menginginkan anak kita kuliah di perguruan tinggi berkualitas dengan biaya serendah-rendahnya. Di negara seperti Jerman dan negara-negara Skandinavia hal itu memang dimungkinkan, tetapi jangan lupa bahwa pajak di negara-negara tersebut sangat tinggi. Artinya, masyarakat telah membayar di depan. Di Indonesia, kesanggupan Pemerintah untuk membiayai perguruan tinggi masih sebatas menggaji dosen dan membiayai kegiatan operasional rutin, belum untuk kualitas. Sumbangan dari masyarakat masih diperlukan, dan untuk itu masyarakat harus mau berinvestasi, bila terpaksa dengan meminjam dari bank, karena mereka *tokh* akan memetik buahnya di kemudian hari. Singkat kata, sesungguhnya tidak ada yang gratis; kalau anda tidak membayar, pasti ada pihak lain yang membayar untuk anda. Bernegara dan berbangsa itu seperti “patungan” atau “urunan”, setiap orang harus menaruh “uang” untuk kepentingan bersama, bila tidak kemarin (lebih awal), sekarang, atau nanti (belakangan).

Bandung, 7 November 2014

Hendra Gunawan

Guru Besar Matematika

FMIPA ITB